

**MENELAAH KEBIJAKAN KURIKULUM DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
TERKAIT TUJUAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI BRUNEI  
DARUSSALAM**

Rina Farbriani<sup>1</sup>, Helmiati<sup>2</sup>, M. Nazir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [rinafabriani2019@gmail.com](mailto:rinafabriani2019@gmail.com)<sup>1</sup>, [helmiati@uin-suska.ac.id](mailto:helmiati@uin-suska.ac.id)<sup>2</sup>, [m.nazir@uin-suska.ac.id](mailto:m.nazir@uin-suska.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Brunei Darussalam merupakan negara Asean yang masuk dalam kategori negara maju bersama dengan Singapura, sedangkan negara Asean lainnya yang masih berstatus negara berkembang adalah Indonesia. Kemajuan suatu negara ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Makalah ini akan membahas analisis kebijakan kurikulum pada lembaga pendidikan Islam dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan Islam di Brunei Darussalam. Melalui metode penelitian kepustakaan ditemukan bahwa Melayu Islam Beraja ( MIB ) dijadikan sebagai falsafah dan ideologi di Brunei Darussalam, Kurikulum pendidikan berbasis Melayu Islam Beraja ( MIB ) yaitu penanaman nilai - nilai Islam dan negara dengan tiga konsep yaitu : Melestarikan Negara Melayu, Melestarikan Negara Islam, dan Melestarikan Negara Kerajaan yang memadukan antara ilmu agama dan penguasaan teknologi . Terdapat perbedaan sistem penggolongan sekolah dengan Indonesia, di Indonesia jenjang sekolah dasar diselesaikan selama 9 tahun yaitu pada jenjang SD /MI dan SMP /MTs tanpa mensyaratkan pendidikan jenjang Taman Kanak- kanak, sedangkan di Brunei Darussalam hanya 7 tahun termasuk pendidikan Taman Kanak - kanak. anak yang dibutuhkan sejak usia 5 tahun. Selain itu, Brunei Darussalam telah mewajibkan pembelajaran menggunakan bahasa Inggris di tingkat sekolah menengah atas dan seterusnya. Dalam Pendidikan Agama Islam terdapat kesamaan kurikulum mata pelajaran Agama yang harus ada pada setiap jenjang pendidikan.

**Kata Kunci:** Kurikulum, PAI, Brunei Darussalam.

**Abstract:** Brunei Darussalam is an Asean country which is included in the developed country category along with Singapore, while another Asean country which still has the status of a developing country is Indonesia. A country's progress is determined by its level of education. This paper will discuss curriculum policy analysis in institutions Islamic education in relation to the goals of Islamic education in Brunei Darussalam. Through literature research methods it was found that Malay Islam Beraja (MIB) was used as a philosophy and ideology in Brunei Darussalam. The educational curriculum is based on Malay Islam Beraja (MIB), namely the instillation of values. Islam and the state with three concepts, namely: Preserving the Malay State, Preserving the Islamic State, and Preserving the Royal State which combines religious knowledge

*and mastery of technology. There is a difference in the school classification system with Indonesia, in Indonesia the primary school level is completed in 9 years, namely at the SD/MI and SMP/MTs levels without requiring kindergarten level education, whereas in Brunei Darussalam it is only 7 years including kindergarten education. children are required from the age of 5. In addition, Brunei Darussalam has made learning English mandatory at high school level and beyond. In Islamic Religious Education, there is a common curriculum for religious subjects that must be present at every level of education.*

**Keywords:** Curriculum, PAI, Brunei Darussalam.

## **PENDAHULUAN**

Kecepatan pembangunan masyarakat bersumber dari dunia pendidikan, karena melalui pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan bangsa, sehingga kebijakan kurikulum di suatu negara tidak lepas dari pengaruh kekuasaan. Visi dan misi suatu negara harus dikembangkan dan dirumuskan dari semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Tergantung pada pendekatan negaranya, kurikulum selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan maknanya, serta menentukan jalan menuju tujuan pendidikan negara tersebut.

Brunei Darussalam di dua negara yang masuk dalam kategori negara berkembang di ASEAN, pengalaman menunjukkan bahwa negara yang mencapai kesejahteraan dan kesejahteraan rakyatnya adalah negara yang memulai pembangunan pendidikannya, begitu pula sumber dayanya tidak bagus. Dengan tenaga masyarakat dan pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka akan menikmati kehidupan bangsa. Jadi benar maju atau mundurnya suatu negara bisa dilihat dari kualitas sumber daya manusianya.

Oleh karena itu, karena paksaan yang tiba-tiba, konsep pendidikan sebagai kebijakan publik telah dibahas sebagai sektor tersendiri di berbagai negara di dunia. Berbagai kebijakan pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya warga, mulai dari pendanaan, kurikulum, peta pendidikan dan tujuan pendidikan, kemudian dimasukkan sebagai pedoman sistem pendidikan di pulau tersebut. Bahkan dari sistem pendidikan nasional suatu negara, dapat diketahui apakah negara tersebut menganut tradisi pendidikan liberal, sekuler, komunis atau agama, dan itu merupakan budaya fundamentalnya.

Pendidikan Islam mempunyai kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara agar dapat mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Namun, tentu saja setiap negara akan berbeda dalam menerapkan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasionalnya.

Perbedaan penerapan sistem pendidikan Islam di suatu negara dipengaruhi oleh mayoritas atau minoritas warga negaranya yang beragama Islam. Artinya, di suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, nuansa penyelenggaraan pendidikan Islam tentu akan berbeda dengan negara yang penduduknya seimbang atau minoritas yang beragama Islam, meskipun perbedaan nuansanya sangat mencolok atau samar.

Selain itu, perbedaan penyelenggaraan pendidikan Islam antara satu negara dengan negara lainnya juga dipengaruhi oleh faktor sejarah, baik sejarah berdirinya negara tersebut maupun sejarah panjang lahirnya pendidikan Islam itu sendiri.

Indonesia dan Brunei Darussalam serupa karena warganya sebagian besar beragama Islam. Namun jika berbicara tentang sistem pendidikan Islam antara kedua negara, terdapat banyak persamaan dan perbedaan. Dalam artikel ini, penulis menganalisis kebijakan kurikulum di lembaga pendidikan Islam kaitannya dengan tujuan pendidikan dalam perspektif Islam di Brunei Darussalam.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini pada dasarnya merupakan kajian yang bersifat *library research*<sup>1</sup> yakni penelaahan kepustakaan terhadap karya-karya ilmiah yang ada di pustaka yang berkaitan dengan kebijakan kurikulum di lembaga pendidikan Islam kaitannya dengan tujuan pendidikan dalam perspektif Islam di Brunei Darussalam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang meliputi telaah dokumen. Dalam istilah Creswell mendefinisikan Penelitian ini disebut sebagai pencarian studi kepustakaan (*library research*) dengan mereview jurnal, buku, laporan penelitian dan literatur lain yang sejalan dengan pembahasan yang dikaji dalam Penelitian ini. Peneliti melakukan dengan Langkah-langkah yaitu pertama, melakukan penelusuran literatur yang sesuai dengan materi yang

---

<sup>1</sup>M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 9.

akan diteliti; kedua, setelah data terkumpul, penulis menganalisis data sesuai dengan pemahaman peneliti saat melakukan Penelitian ini.<sup>2</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Kebijakan (*Policy of Analisy*)**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia ditemukan definisi analisis adalah sebagai berikut: 1). Penyelidikan terhadap suatu peristiwa guna mengetahui suatu kondisi sesuai faktanya. 2) Penguraian suatu pokok atas berbagai telaah beberapa bagian atau hubungan antar unit untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh.<sup>3</sup>

Sedangkan kebijakan secara *epistemologi* adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.<sup>4</sup>

Teori tentang kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara.<sup>5</sup>

Analisis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan: 1). Nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk melihat penyelesaian masalah, 2). Fakta yang keberadaanya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, dan 3). Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.<sup>6</sup>

Dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang rasional dan masuk akal, seorang analis dapat memakai satu atau lebih dari tiga pendekatan analisis yaitu empiris, valuatif, dan normatif. Pendekatan empiris suatu kebijakan publik dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi tentang sebab akibat dari kebijakan tertentu dan macam macam informasi lainnya yang

---

<sup>2</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 7.

<sup>3</sup>Arwildayanto, dkk *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. (Bandung: Cendikia Press, 2018), h. 7.

<sup>4</sup>Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.10.

<sup>5</sup>Muhammad Nur Asnawi, "Kebijakan Pendidikan Islam Pada Era Globalisasi, Pasar Bebas, dan Revolusi Industri 4.0" dalam *Scolae: Journal of Pedagogy, Volume 1, Number 2, 2018: 101-109*, h. 102.

<sup>6</sup>William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h. 97.

dihasilkan bersifat deskriptif, sebaliknya pendekatan evaluatif dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi tentang bobot nilai dari kebijakan itu sendiri. Sedangkan pendekatan normatif dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi-informasi tentang serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik (rekomendasi).<sup>7</sup>

Analisis kebijakan terbagi menjadi dua, yakni analisis tentang suatu kebijakan (*Policy of Analysys*) dan analisis untuk suatu kebijakan (*Policy For Analysys*).<sup>8</sup> Penelitian tentang analisis suatu kebijakan membahas tentang hasil suatu kebijakan, sedangkan penelitian analisis untuk suatu kebijakan membahas tentang proses kebijakan atau analisis yang dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan, mulai dari proses perencanaan, perumusan, dan implementasi kebijakan.

Konteks yang diteliti dalam kebijakan pendidikan adalah konteks kebijakannya karena kebijakan tidak lahir dengan kekosongan, melainkan kebijakan lahir dari seperangkat nilai, tuntutan, tekanan, dan jawaban dari masalah masalah tertentu.

## **2. Kurikulum**

Istilah kurikulum pada awal munculnya digunakan dalam dunia olahraga pada zaman yunani kuno, yang berasal dari kata *courier* artinya pelari *curure* artinya tempat berpacu, kurikulum artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Namun pada tahun 1955 kurikulum digunakan dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh peserta didik sehingga mendapatkan ijazah.<sup>9</sup>

Sedangkan pengertian kurikulum yang dalam bahasa arab disebut Manhaj menurut Muhammad Ali Al-khouly adalah seperangkat perencanaan untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang direncanakan.<sup>10</sup>

Kurikulum dalam makna tersebut diatas tentulah sangat sempit dan dikenal sebagai pandangan lama, karena seolah olah dengan pandangan tersebut belajar hanyalah sekedar membaca buku buku teks pelajaran yang sudah ditetapkan sebagai sumber bahan pelajaran di

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 98.

<sup>8</sup>Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 244.

<sup>9</sup>A. Heris Hermawan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 224.

<sup>10</sup>*Ibid.*

sekolah, dan pandangan tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan zaman modern seperti sekarang ini.

Seperti yang dijelaskan dalam bukunya Mahmud dan Tedi Priatna, kurikulum bukanlah hanya sekedar perangkat pembelajaran tetapi sesuatu yang nyata yang ada dalam proses pendidikan di sekolah, baik di dalam kelas maupun diluar kelas dan dalam pergaulan sehari-hari yang kesemuanya itu diorganisir oleh sekolah.<sup>11</sup> Semua yang nyata terjadi di dalam sekolah bukan hanya menyangkut perencanaan pembelajaran, namun mencakup rumusan hasil belajar yang dikehendaki, penyediaan kesempatan belajar dan kewajiban peserta didik.

### **3. Lembaga Pendidikan Islam**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) daring, lembaga adalah asal mula (yang akan menjadi sesuatu), bentuk (rupa yang asli), badan (organisasi) yang tujuannya melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan usaha.<sup>12</sup> Sedangkan pendidikan Islam adalah usaha pengembangan fitrah manusia agar tercapai kehidupan manusia yang bahagia didunia dan akhirat. Ahmad D Rimba mengartikan pendidikan Islam sebagai bimbingan jasmani dan rohani dengan berdasarkan pada hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam<sup>13</sup> yakni berakhlakul karimah.

Muhaimin mengartikan lembaga pendidikan islam adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan dan didirikan dengan tujuan untuk mengefektifkan ajaran dan nilai nilai Islam.<sup>14</sup> Lembaga pendidikan Islam dalam pengertian konkrit adalah wadah atau sarana prasarana, sedangkan dalam pengertian yang abstrak adalah norma-norma, serta peraturan peraturan yang bersumber dari Islam.

Dari sekelumit definisi diatas maka dapat disimpulkan lembaga pendidikan Islam adalah wadah atau tempat berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan Islam dengan berbagai sarana dan prasarana, peraturan peraturan serta penanggung jawab pendidikan yang didirikan dalam rangka mengajarkan nilai nilai akhlakul karimah yang bersumber dari hukum hukum Islam.

---

<sup>11</sup>Mahmud dan Tedi Priatna, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Sahifa, 2005), h. 135-137.

<sup>12</sup>KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembaga>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024, pukul 21.21 Wib

<sup>13</sup>Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1991), h. 77.

<sup>14</sup>Muhaimin, *Pemikiran dan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 39.

Di Indonesia, lembaga pendidikan Islam lebih dikenal dengan istilah pondok pesantren dan madrasah madrasah sesuai dengan tingkatannya yakni Madrasah Ibtidaiyyah (MI) untuk setingkat sekolah dasar, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Untuk setingkat SLTP, Madrasah Aliyah (MA) untuk setingkat SMA, dan Universitas Islam untuk setingkat perguruan tinggi.

#### **4. Tujuan Pendidikan dalam Perspektif Islam**

Pendidikan Islam sebagai kegiatan yang terencana wajib memiliki tujuan yang akan dicapai. Tujuan pendidikan Islam harus mampu mengakomodir 3 fungsi utama yakni 1). Fungsi spiritual yang berkaitan dengan akidah dan iman, 2). Fungsi psikologis yakni berkaitan dengan tingkah laku individu, dan 3). Fungsi sosial yakni yang berkaitan dengan aturan-aturan yang menghubungkan manusia dengan manusia lainnya.<sup>15</sup>

Tujuan pendidikan ditentukan berdasarkan pada tujuan hidup. Sedangkan tujuan hidup itu dipengaruhi dari hakikat manusia, tujuan pendidikan adalah penjabaran dari tujuan hidup manusia. Hal ini senada dengan pendapat Lunglung, berbicara tentang tujuan pendidikan, maka harus terlebih dahulu mengetahui tujuan hidup manusia. Karena keduanya merupakan dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Dalam perspektif Islam tujuan hidup manusia sudah ditentukan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an yakni berikut ini :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *"Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku"* (Q.S. adz-Dzariyat ayat 56)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa"* (Q.S. al-Baqarah ayat 21)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka*

---

<sup>15</sup>Hasan Langgulang, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: al-maarif, 1980), h. 178.

*mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”*(Q.S. al-Bayyinah ayat 5).

Selain ibadah tugas manusia lainnya yang tak kalah penting adalah sebagai khalifah, sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah ayat 30 berikut ini:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ  
قَالَ إِنِّي أَغْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S. al-Baqarah ayat 30).

Dari ayat ayat al-Qur’an tersebut maka dapat dipahami bahwa tujuan hidup manusia sebagai makhluk Allah Swt adalah untuk beribadah menyembah Allah Swt dengan penuh kesadaran dan keikhlasan selain itu manusia juga bertugas sebagai khalifah yang bertugas dan berperan dalam menjaga seluruh alam raya ini agar dapat dimanfaatkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Setelah membahas tentang tujuan hidup dalam perspektif Al-Qur’an, maka kemudian menentukan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan ditentukan oleh pandangan hidup orang-orang yang membuat tujuan tersebut. Di Indonesia tujuan pendidikan dirumuskan dalam UU No. 3 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional sebagai berikut: “*Yaitu, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab*”

Contoh lain tujuan pendidikan nasional di negara Malaysia adalah: “*Mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk*



*mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan”.<sup>16</sup>*

Untuk meraih tujuan pendidikan dalam perspektif Islam tersebut maka implementasinya harus benar benar bersumber dari cita cita dalam perspektif Islam tersebut.

## **Analisis Dan Pembahasan**

### **1. Brunei Darussalam**

Brunei berasal dari bahasa sansekerta yakni “*Varunai*” diambil dari kata “*Varunadvipa*” yang artinya pulau Kalimantan. Karena memang Negara Brunei Darussalam berada pada pulau Kalimantan yakni terletak di sebelah barat daya pulau Borneo atau Sabah.<sup>17</sup> Brunei berbagi dalam wilayah pulau Kalimantan dengan Malaysia dan Indonesia.

Brunei Darussalam adalah Negara yang dalam bentuk negaranya adalah Monarki dengan sistem pemerintahan monarki absolut yang dipimpin oleh Sultan, Sultan yang menjabat saat ini adalah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Beliau terlahir dari keluarga bangsawan dan pemeluk agama Islam. Sang ayah yakni Sultan Haji Omar Ali Saifuddien SaAdul Khairi Waddien.

Luas wilayah Negara dengan Ibukota Bandar Sri Begawan ini adalah 5,765 km<sup>2</sup>, dengan garis pantai sepanjang 161 km menghadap Laut Cina Selatan dan Teluk Brunei. Pada tahun 2019, total populasi tercatat 459.500 orang, terdiri dari 244.500 laki-laki dan 215.000 perempuan. Dalam populasi tersebut, warga negara Brunei berjumlah 331.800 orang (Suku Melayu), dan sisanya terdiri dari warga negara asing dengan 33.500 orang (Etnis China dan India). Mayoritas warga Negara Brunei Darussalam beragama Islam 67%, Kristen 10%, Budha 13% dan animisme serta aliran kepercayaan 10%, yang pada umumnya dianut non-Melayu. Bahasa utama yang digunakan adalah bahasa melayu, bahasa lainnya adalah bahasa china, yang secara keseluruhan ada 17 bahasa.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>A. Heris Hermawan, *Op.cit*, h. 117.

<sup>17</sup>Aslan, Suhari, “Sejarah kurikulum pendidikan islam di Brunei Darussalam” dalam *Jurnal Iqra', kajian Ilmu Pendidikan*, E-ISSN: 2548-7892 & P-ISSN: 2527-4449, Volume 4, Issue 1, June 2019

<sup>18</sup><https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 23.50 WIB.

Sistem hukum di Brunei Darussalam berdasarkan sistem hukum Inggris dengan perpaduan sistem Syariah untuk kaum muslim. Pada 2014, Brunei menjadi negara pertama yang mengadopsi hukum Islam ketat, baik untuk para warga muslim maupun non-muslim, dengan berlakunya hukum pidana syariah 2013.

## **2. Sistem Kebijakan di Brunei Darussalam**

Brunei Darussalam adalah Negara yang menganut system politik pemerintahan monarki absolut. Dengan konstitusi 1959 Brunei yang merupakan system pemerintahan warisan dari penjajah inggris. Yang Mulya Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah adalah kepala negara dengan kekuasaan eksekutif penuh, bahkan Sultan diabadikan dalam filosofi nasional Brunei Darussalam bernama Melayu Islam Beraja (MIB) yang menggabungkan nilai-nilai Islam dan budaya melayu dalam kerangka politik dengan sistem monarki.

Dengan sistem pemerintahan tersebut, Negara Brunei darussalam juga membuat lembaga yang secara khusus memberikan fatwa-fatwa tentang syariat Islam dalam kerangka negara monarki absolut yang disebut dengan istilah Mufti kerajaan. Sejak tanggal 7 November 1994 atas perintah Sultan Hassanal Bolkiah, departemen Mufti Kerajaan tidak lagi di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama, tetapi menjadi departemen terpisah di bawah Perdana Menteri. Mufti Kerajaan bertanggung jawab langsung kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Mufti Kerajaan. Dengan ditempatkannya jabatan mufti di bawah Perdana Menteri mengukuhkan posisi dan status fatwa menjadi semakin kuat. Misi jabatan Mufti Kerajaan adalah sebagai institusi yang mengeluarkan fatwa dan irsyad (panduan dan bimbingan), dan menjadi institusi yang mengumpulkan, mengeluarkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan Islam.<sup>19</sup>

Kekuasaan absolut menjadi milik sultan, Sultan sebagai raja, sebagai kepala negara, kepala agama, kepala pemerintahan. Namun, pada bulan september tahun 2000 Sultan untuk pertama kalinya membentuk dewan legislatif dengan beranggotakan 36 anggota yang ditunjuk langsung oleh sultan. Berbeda dengan indonesia dan negara-negara lain yang menganut sistem demokrasi, dewan legislatif di Brunei Darussalam hanya memiliki tugas konsultatif dan tidak mempunyai

---

<sup>19</sup>Haji Japar bin Haji Mat Dain, *Institusi Fatwa: Peranan dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam*, h. 100.

kewenangan dalam memutuskan suatu kebijakan. Dan kebijakan dalam segala hal sepenuhnya berada di bawah kewenangan sultan.

### **3. Sejarah Lembaga Pendidikan Islam di Brunei Darussalam**

Sejarah pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dengan sejarah datang dan masuk agama Islam di suatu negara, sama halnya dengan Negara Brunei Darussalam, sebelum masuk Islam, dalam sejarahnya manusia beragama tidak lepas dari agama animisme dan dinamisme. Dengan datangnya agama Islam maka agama tersebut mengalami perpaduan antara islam dengan dan agama lama atau disebut dengan istilah agama *sinkretik*, artinya di satu sisi masyarakat sudah memeluk agama Islam tetapi pada sisi lainnya masih ada yang menganut agama lama sebagai agama dari nenek moyang mereka. Dan perpaduan ajaran agama di seluruh Negara akan mempengaruhi sistem pendidikannya, sama halnya dengan Negara Brunei Darussalam.

Sejarah masuknya Islam di Brunei Darussalam dipengaruhi oleh banyaknya pelayar dengan berbagai macam agama termasuk agama Islam yang singgah di pulau Borneo tersebut. Pulau Borneo pada saat itu menjadi tempat persinggahan pelayaran dari india ke china atau sebaliknya, sehingga membawa pengaruh bagi datangnya agama Islam di Brunei Darussalam.<sup>20</sup>

Masuknya agama Islam di Brunei Darussalam menurut para sejarawan adalah pada tahun 440 H/1028 M, ditandai dengan ditemukannya nisan makam yang bertuliskan “*batu nisan al-Mukhdaroh*”. Adanya batu nisan bertuliskan arab ini kemudian dijadikan sebagai petunjuk yang jelas bagi masuknya agama Islam di Brunei Darussalam karena tulisan arab identik dengan Islam dan tidak mungkin agama lain menggunakan bahasa arab apalagi pada saat itu bahasa tidak mudah dikenal oleh masyarakat dunia seperti zaman sekarang.

Selain itu, pada tahun 1370 M, ditemukan catatan sejarah China tentang seorang raja yang bernama *Ma-ha-mo-sya* atau yang dikenal dengan Sultan Muhammad Syah yang mengirim surat dengan menggunakan tulisan khat arab, temuan ini menguatkan bahwa agama Islam telah masuk ke Brunei Darussalam pada sebelum tahun 1368 M.<sup>21</sup>

Catatan sejarah China lainnya adalah utusan china yang diketuai oleh seorang yang beragama Islam yakni *Cheng Ho* pernah datang ke Brunei Darussalam pada tahun 1405 M dan pada saat itu

---

<sup>20</sup>Aslan, *Op.cit.*, h. 114.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 114.

Brunei Darussalam sudah terbentuk sebuah kerajaan dan keluarga raja dengan gelar pangeran. Ketiga catatan sejarah ini tidaklah saling bertentangan tapi justru saling menguatkan tentang sejarah masuknya Islam di Negara Brunei Darussalam.

Masuknya agama Islam di Brunei Darussalam mempunyai sejarah penting bagi kemunculan lembaga pendidikan Islam, berikut ini:<sup>22</sup>

1. Pada awal mula kemunculan agama Islam, pendidikan Islam diselenggarakan di masjid-masjid, surau-surau, balai-balai dan di rumah-rumah. Bentuk pendidikan pada masa awal yang diinisiasi oleh pihak kerajaan ini terbagi menjadi dua: *Pertama* Umum diperuntukkan bagi masyarakat yang belum pandai baca tulis, mengaji al-qur'an, zikir, hadrah, sholat dll, *Kedua* Khusus bagi orang yang telah pandai baca tulis, ilmu fiqih, faraidh, babun nikah, nahwu, qowa'id, tasawuf dan ahlak.
2. Pada tahun 1912, pendidikan formal di Brunei Darussalam dimulai pada tahun 1912 dengan dibukanya sekolah melayu pertama di Bandar Brunei (Sekarang Bandar Seri Begawan).<sup>23</sup>
3. Pada tahun 1929, dibangun satu sekolah agama yang pertama di Brunei Darussalam dalam bentuk bangunan balai peribadatan, di balai inilah pendidikan agama bagi anak-anak melayu diselenggarakan. Didirikannya sekolah agama yang pertama ini diiringi dengan raja Brunei membuat peraturan yang disebut dengan "*The School Attendance Enactment 1929*" yang mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ketika sudah memasuki umur 7-14 tahun dan denda antara 50 sen sampai seratus dolar.<sup>24</sup>
4. Pada tahun 1930, sekolah perempuan pertama dibuka di Bandar Brunei, sekolah ini dikenal dengan sekolah rendah Raja Isteri Fatimah, dalam perjalanannya sekolah perempuan pertama ini kemudian ditutup karena rendahnya peserta didik yang mendaftar, kesadaran orang tua terhadap pendidikan bagi anak perempuan pada saat itu masih rendah.
5. Pada tahun 1936, dibangun sekolah melayu di suatu daerah bernama Kuala belit. Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi perempuan sudah mulai meningkat pada tahun ini, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya peserta didik perempuan, dalam perkembangannya mulai

---

<sup>22</sup>Mislaini, "Pendidikan Islam di Brunei Darussalam" dalam *al-Kahfi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume IV, No. 2, Juli Tahun 2019, h. 12.

<sup>23</sup>Haji Awang Mohd. Jamil al-Sufri, *Tarsilah Brunei: Sejarah awal dan Perkembangan Islam*, (Brunei Darussalam: Kementerian Kebudayaan, 2003), h. 3.

<sup>24</sup>Aslan, *Op.cit.*, h. 122.

tahun berdiri sampai tahun 1938 jumlah peserta didik yang mendaftar terus meningkat baik laki-laki maupun perempuan, sehingga pada tahun yang sama juga dibuka satu sekolah yang bertempat di jalan Sultan Bandar Brunei Darussalam. Dan bahkan anak Sultan juga bergabung sebagai peserta didik di sekolah ini.

6. Pada tahun 1940, Sultan Ahmad Tajudin mendirikan sekolah arab, namun dalam perkembangannya sekolah ini tutup karena berbagai masalah, selain sepi pesertanya sebagai akibat rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga dikarenakan kesulitan ekonomi yang membelenggu masyarakat akibat belenggu penjajah inggris.
7. Pada tahun 1954, dibentuk kementerian Hal Ehwal Agama yang mengurus bidang pendidikan agama. Melalui kebijakan dalam Dasar Pendidikan 1954 *Sultan Omar "Ali Saifuddein Sa'adul Khairi Waddie* menggratiskan biaya pendidikan bagi anak-anak melayu mulai dari umur 6 tahun.
8. Pada tahun 1958, didirikan sekolah khusus bagi orang dewasa di kawasan Bandar Seri Begawan. Sekolah dewasa ini bertujuan :
  - a) Mampu membaca al-qur'an dengan tartil sesuai tajwid serta irama bacaannya,
  - b) Mampu memahami ibadah fardhu 'ain dan fardhu' kifayah secara teori dan praktek,
  - c) Membiasakan ta'at kepada Allah Swt, Rasul Saw serta Sultan (ulul amri),
  - d) Senantiasa aktif untuk memakmurkan masjid dan menyi'arkan agama Islam.
  - e) Memahami seluruh ajaran Islam.
9. Pada tahun 1965, didirikan sekolah rendah dan menengah, dengan tujuan:
  - a) Menyelenggarakan pendidikan dengan berdasarkan pada asas Islam,
  - b) mengembangkan kesehatan rohani,
  - c) meningkatkan kepercayaan pada Islam dalam kehidupan secara utuh,
  - d) memperkenalkan Islam sebagai agama yang hak,
  - e) mempererat persaudaraan antar sesama sebangsa, dan seagama.
10. Pada tahun 1966, didirikan sekolah menengah dan menengah arab disebut dengan MPUSB (Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan) dan sekarang sudah menjadi KUPUSB (Kolej

University Perguruan Ugama Seri Begawan) dan baru beroperasi pada tahun 1972, dengan tujuan: a). mengadakan pelatihan guru agama, b). mengadakan kursus baca al-Qur'an dan berdakwah, c). meningkatkan taraf ilmu agama bagi para pegawai kerajaan.

11. Sepanjang tahun 1975-1984 Brunei Darussalam terus membangun sekolah agama sehingga mencapai 7 sekolah agama yang terdiri dari 3 sekolah di daerah Brunei Muara, 2 sekolah di daerah Belait, 1 sekolah di daerah Tutong dan 1 lagi di daerah Temburong.<sup>25</sup> Dan pada tahun 1984 didirikan Pra Sekolah Agama.
12. Pada tahun 1985, satu tahun setelah merdeka dari penjajah Inggris, Brunei Darussalam membangun 102 sekolah agama, dan tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1986 kementerian Hal Ehwal Ugama membuat jabatan pengajian Islam yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan pendidikan agama.
13. Pada tanggal 1 Januari 2007 Brunei Darussalam mendirikan Universitas Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), dan pada tanggal 20 Januari 2007 Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan (MPUSB) ditingkatkan menjadi Kolej University Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPUSB).

#### **4. Sejarah Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Brunei Darussalam**

Negara Brunei Darussalam meraih kemerdekaannya yakni pada tanggal 24 Robi'ul awal 1404 Hijriah bersamaan dengan 1 Januari 1984 Masehi dengan memproklamkan Falsafah Melayu Islam Beraja (MIB), yang berbunyi “.....bahwa mulai 1 Januari 1984 negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin Allah SWT akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja yang merdeka. Berdaulat dan demokratik bersendikan ajaran-ajaran Islam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah”.<sup>26</sup> Diantara Negara-negara rumpun melayu, Brunei Darussalam adalah Negara yang termuda dilihat dari keberhasilan memproklamkan diri sebagai sebuah Negara yang merdeka.

Setelah meraih kemerdekaannya itu, Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam yang sudah ada sejak tahun 1954 mulai memprioritaskan arahnya pada pembangunan sumber daya

---

<sup>25</sup>Mustaffa Abdullah, *Khazanah Tafsir di Nusantara*, (The University Of Malaysia Pers, 2011), h. 254.

<sup>26</sup>Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h.

manusia (SDM) untuk membawa Brunei ke arah kemajuan pembangunan di era globalisasi. Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia tersebut, Brunei Darussalam mengerahkan segala daya dan upaya untuk meningkatkan melalui sektor pendidikan baik pada sekolah sekolah teknik maupun sekolah agama.

Tujuan pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak, beragama dan menguasai teknologi, karena itulah pemerintah dalam hal ini kerajaan Brunei mengeluarkan 3 (tiga) Kebijakan penting dalam dunia pendidikan di Brunei Darussalam, yaitu: 1. Menggunakan sistem dwi bahasa di semua sekolah, 2. Menggunakan kurikulum berbasis Melayu Islam Beraja (MIB), 3. Dan meningkatkan serta mengembangkan sumber daya manusia (SDM) termasuk pendidikan vokasional (kejuruan) dan teknik. Artinya kebijakan strategis bidang pendidikan pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan SDM sejalan dengan identitas negaranya dan outputnya berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi.

Penyelenggaraan pendidikan Islam sebagai sebuah system pendidikan berada di bawah kementerian pendidikan yang disebut dengan kementerian Hal Ehwal Ugama, kemudian mengatur tentang kurikulum, tingkatan kelas, dan tujuan pendidikan sesuai dengan 3 kebijakan penting tersebut.

Khusus pada Pendidikan Agama Islam kerajaan tetap memberikan porsi prioritas agar rakyat Brunei mampu menghayati dan mengamalkan syariat Islam dalam kehidupannya secara menyeluruh. Dengan demikian kerajaan berharap agar Islam selalu eksis pada bangsa melayu yang setia pada rajanya dan terus mendaulat rajanya dengan gemilang sesuai dengan substansi falsafah Negara yakni Melayu Islam Beraja (MIB).

Pendidikan agama Islam di Brunei Darussalam benar benar diutamakan baik disekolah umum maupun sekolah agama, terbukti dengan kurikulumnya adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Kurikulum Sijil Tinggi Pelajaran Agama di Sekolah Menengah Arab Agama Hasanal Bolkiah terdapat tiga jurusan yakni: *Pertama*, Jurusan Syari'ah yaitu pelajaran Al-Qur'an disertai dengan tiga mata pelajaran yakni Fiqih/Ushul Fiqih, tafsir/Ulumul Qur'an, dan Tarekh Islam/Tasyri'. *Kedua*, Jurusan Ushuluddin yaitu pelajaran Al-Qur'an diserta dengan tiga mata pelajaran yakni Tauhid/Mantiq, Tafsir/Ulumul Qur'an, dan Tarekh Tasyri'. Dan

---

<sup>27</sup>Mislani, *Op.citi.*, h. 14.

*Ketiga*, Jurusan Lughat disertai dengan tiga mata pelajaran juga yakni Qawaid arabiiyyah, Bahasa Melayu dan bahasa Inggris.

- 2) Kurikulum Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit dalam tiga kelompok: *Pertama* Mata pelajaran Lisan: al-Qur'an diikuti Bahasa Arab, *Kedua* pelajaran wajib: bahasa Melayu, fiqh Islam, tauhid, dan tafsir/hadis, dan *Ketiga* Mata pelajaran pilihan: sejarah, bahasa, ilmu alam, ilmu hisab, dan lain-lain.
- 3) Kurikulum ITQ (Institut Tahfiz al-Qur'an) Hasanah Bolkiah: *Pertama* Mata Pelajaran Lisan: al-Qur'an, Bahasa Arab; *Kedua* Mata Pelajaran Wajib: Bahasa Arab, Bahasa Melayu, Fiqh Islam, Tafsir/Hadis; *Ketiga* Mata Pelajaran Pilihan: Sejarah, Ilmu Alam, Ilmu Hisab, dll.
- 4) Kurikulum Ma'had Islam Brunei di Tutong sama dengan ITQ: *Pertama* Mata Pelajaran Lisan: al-Qur'an, Bahasa Arab; *Kedua* Mata Pelajaran Wajib: Bahasa Arab, Bahasa Melayu, Fiqh Islam, Tafsir/Hadis, *ketiga* Mata Pelajaran Pilihan: Sejarah, Ilmu Alam, Ilmu Hisab, dll.

Penguatan Islam sebagai agama negara sesuai konsensus filosofi MIB (Melayu Islam Beraja). Pelajaran agama di negara Islam/Brunei lebih ditekankan agar pendidikan itu membentuk manusia yang berakhlak, bermoral dan berkepribadian luhur. Secara umum tujuan pendidikan Brunei Darussalam adalah terbentuknya manusia yang berakhlak dan beragama serta menguasai teknologi tinggi.<sup>28</sup> Sedangkan sistem pendidikan umum di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia dan negara-negara “*commonwealth*” Inggris seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Brunei Darussalam menyadari betul pentingnya Pendidikan Agama Islam pada pembangunan kekuatan negara, Brunei memadukan pendidikan sains dengan pendidikan agama. Pada pendidikan tinggi seperti di *Technical College* Brunei seperti juga di sekolah kejuruan lainnya di samping menawarkan isi soal sains seperti listrik dan elektronika juga mengembangkan Studi Islam. Tentu saja pengajaran Islam lebih menguat pada sekolah agama dan Arab seperti juga di pendidikan tinggi yang khusus agama seperti KUPU dan ma'had al-Qur'an yang langsung di bawah kerajaan dan mendapat fasilitas dana dan sarana prasarana kelembagaan yang menjanjikan dari istana.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 19.



## **5. Perbandingan Pendidikan Islam di Brunei Darussalam dengan Indonesia**

### **1) Sejarah Kelembagaan Pendidikan Islam**

Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia dikenal dengan istilah Madrasah, dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia tidak serta merta diiringi dengan lahirnya madrasah. Namun dalam masa penyebaran Islam di Indonesia mulai bermunculan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang disebut dengan istilah Pesantren. Oleh karena itu pesantren secara historis merupakan cikal bakal lahirnya madrasah di Indonesia.<sup>29</sup>

Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yakni pada UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang formal diatur dalam pasal 17 yang menyatakan bahwa Pendidikan dasar adalah berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyyah (MI) serta sekolah menengah pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pendidikan dasar di Indonesia ditempuh selama 9 Tahun yakni SD/MI selama 6 tahun dan SMP/Ts selama 3 tahun. Sedangkan sekolah menengah diatur dalam pasal 18 yakni sekolah menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Dan pendidikan tinggi diatur dalam pasal 20 yakni pendidikan tinggi berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.

Di Indonesia lembaga pendidikan Islam disebut dengan istilah Madrasah, Pesantren, Atau Sekolah Islam sedangkan di Brunei Darussalam disebut dengan istilah sekolah agama atau sekolah arab.

Dilihat dari sejarahnya pendidikan Islam di Brunei Darussalam diselenggarakan di masjid-masjid, surau-surau, balai-balai dan di rumah-rumah, sedangkan di Indonesia Sejak awal kemunculannya, Pesantren sebagai cikal bakal madrasah di Indonesia sudah mengadopsi sistem sekolah modern dengan ciri-ciri: digunakannya sistem kelas dan pengelompokkan pelajaran-pelajaran.

Pendidikan di Brunei Darussalam mengutamakan pembentukan akhlak dalam beragama dan penguasaan teknologi. Brunei Darussalam telah memulai pengajaran pendidikan sejak awal abad ke-20 khususnya pengajaran agama Islam. Sekolah-sekolah didirikan secara khusus untuk untuk

---

<sup>29</sup>Hasbi Abduh, *Op.cit*, h. 8.

beberapa bangsa utamanya bangsa Melayu, bangsa Tionghoa dan bangsa Inggris dengan bahasanya masing-masing. Berselang kemudian, pada paruh kedua abad ke-20 terjadi reformasi pendidikan di Brunei Darussalam yang mengintegrasikan pendidikan Islam dengan pendidikan modern.<sup>30</sup>

Sejak tahun 2008, Brunei telah mulai melakukan transisi kepada sistem pendidikan baru yang disebutkan sebagai SPN21, akronim dari system pendidikan Negara abad ke 21.<sup>31</sup> SPN21 adalah system pendidikan dirancang untuk memberikan kesempatan dan kelulusan bagi para siswa untuk mencapai setatus pendidikan yang tinggi sesuai dengan kemampuan akademik mereka masing-masing, sebagaimana misi meo (kementrian pendidikan) adalah untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh untuk mencapai potensi yang penuh bagi semua.<sup>32</sup>

## **2) Kurikulum**

Kurikulum di Indonesia mengalami banyak perkembangan perubahan dari masa ke masa, dimulai dari awal kurikulum 1947 yang merinci rencana pelajaran dengan terurai, kemudian kurikulum tahun 1964 rencana pendidikan sekolah dasar, kurikulum 1968 kurikulum sekolah dasar, kurikulum tahun 1973 kurikulum proyek perintis pembangunan, kurikulum tahun 1975 kembali ke kurikulum sekolah dasar, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 1997 sebagai kurikulum revisi 1994, kurikulum tahun 2004 rintisan kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan terakhir adalah kurikulum 2013.

Sedangkan di Brunei Darussalam hanya mengacu kepada falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) yang memadukan antara agama dan sains, sedangkan implementasi dalam pembelajarannya

---

<sup>30</sup>Tholchah Hasan menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) usaha memajukan kualitas manusia, yaitu: (1) Dimensi kepribadian sebagai manusia, yaitu kemampuan untuk menjaga integritas, termasuk sikap, tingkah laku, etika dan moralitas yang sesuai dengan pandangan masyarakat, (2) Dimensi produktivitas, yang menyangkut apa yang dihasilkan oleh manusia itu tadi, dalam hal jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik, dan (3) Dimensi kreativitas, yaitu kemampuan seseorang untuk berfikir dan berbuat kreatif, menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Muh. Tholchah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya*, (Jakarta: Galasa Nusantara, 1997), h. 187-188.

<sup>31</sup>Helmiati, dkk “Analisis Kebijakan Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional ( SPN)-21: Peluang Dan Tantangannya Bagi Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam”, *Geneologi PAI Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9.2 (2022), 210–19.

<sup>32</sup>Hasbi Abduh, “Perbandingan Pendidikan Di Negara Brunei Darussalam Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia:”, *Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5.1 (2016), 1–22. Lihat Syukri, “Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Brunei” dalam *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan Volume 20 Nomor 1 Tahun 2023*, h. 143.

diserahkan kewenangannya pada sekolah sekolah. Dalam pendidikan Islam di Brunei Darussalam munculah berbagai nama kurikulum di berbagai sekolah namun tetap mengacu kepada konsensus falsafah Melayu Islam Beraja, seperti kurikulum Kurikulum Sijil Tinggi Pelajaran Agama di Sekolah Menengah Arab Agama Hassanal Bolkiah, Kurikulum Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit, Kurikulum ITQ (Institut Tahfiz al-Qur'an) Hassanal Bolkiah, dan Kurikulum Ma'had Islam Brunei di Tutong.

### **3) Sistem Perjenjangan**

Penjenjangan pendidikan di Brunei Darussalam dikenal dengan istilah A7-3-2-2 yakni pendidikan tingkat dasar ditempuh selama 7 tahun termasuk didalamnya pendidikan TK pada anak yang berusia lima tahun. Kemudian jenjang pendidikan menengah ditempuh selama 3 tahun, jenjang pendidikan tingkat atas ditempuh selama 2 tahun, dan 2 tahun lagi tingkat pra-universitas.

Sedangkan di Indonesia Pendidikan dasar ditempuh selama 9 Tahun yakni Tingkat Sekolah Dasar dan tingkat SLTP, sedangkan tingkat SLTA ditempuh selama 3 tahun pula tanpa ada jenjang pra-universitas. Anak usia 5 tahun diwajibkan untuk masuk sekolah TK di Brunei Darussalam, sedangkan di Indonesia tidak wajib.

Pada sekolah tingkat Dasar di Brunei Darussalam menggunakan bahasa melayu tetapi wajib berbahasa inggris pada mata pelajaran bahasa inggris sedangkan pada sekolah tingkat atas dan pra-universitas seluruhnya menggunakan bahasa inggris kecuali pelajaran pendidikan agama Islam.

### **4) Tujuan Pendidikan**

Tujuan pendidikan di Brunei Darussalam diwajibkan berpegang teguh pada Falsafah Melayu Islam Beraja yakni perpaduan agama dan sains. Pelajaran agama di negara Brunei lebih ditekankan agar pendidikan itu membentuk manusia yang berakhlak, bermoral dan berkepribadian luhur. Tujuan pendidikan secara umum di Brunei Darussalam adalah terbentuknya manusia yang berakhlak dan beragama serta menguasai teknologi tinggi.

Di Indonesia, tujuan pendidikan dirumuskan dalam UU sistem pendidikan Nasional, yang secara perkembangannya telah mengalami 3 kali perubahan, yakni dalam MPRS No. 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isi UUD

1945, dalam perkembangannya kemudian berubah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa.

Dan setelah era reformasi tujuan pendidikan dirumuskan dalam UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut kedua negara masih terdapat dikotomi ilmu, sistem pendidikan masih menganut pada sekolah umum dan sekolah agama. Penyelenggaraan sekolah umum di Indonesia dibawah kemendikbud, sedangkan sekolah agama di bawah kementerian agama, sama dengan di Brunei Darussalam, urusan sekolah umum di bawah kementerian pendidikan, sedangkan urusan pendidikan agama berada pada kementerian hal ehwal ugama. Bedanya adalah di Brunei Darussalam, pendidikan agama Islam mampu di koperasi oleh kerajaan yakni menganut mazhab syafii saja, sedangkan di Indonesia tidak mampu mengkooptasi pendidikan agama Islam.

## **6. Analisis Kebijakan Kurikulum pada Lembaga Pendidikan Islam Dikaitkan dengan Tujuan Pendidikan Islam dalam Perspekti Islam di Brunei Darussalam**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Melayu Islam Beraja (MIB) di Brunei Darussalam dijadikan sebagai falsafah negara, yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan, Untuk menerapkan Melayu Islam Beraja dalam bidang pendidikan maka pemerintah Brunei Darussalam menunjuk tim untuk menyusun materi secara cermat dan lengkap untuk dimasukkan dalam kurikulum pelajaran dari pendidikan terendah sampai tertinggi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Abd. Ghofur, "Islam dan Politik di Brunei Darussalam, Suatu Tinjauan Sosio-Historis" dalam *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2005, h. 54.

Melayu Islam Beraja (MIB) yang terdiri dari 2 dasar, yaitu: *pertama*, Islam sebagai Guiding Principle, dan *kedua* Islam sebagai Form of Fortification. Dari dua dasar ini kemudian muncul penanaman nilai-nilai keIslaman kenegaraan (pengekalan) dengan tiga konsep, yaitu: Mengekalkan Negara Melayu; Mengekalkan Negara Islam (hukum Islam yang bermazhab Syafi'i – dari sisi fiqhnya – dan bermazhab Ahl Sunnah wal Jamaah – dari sisi akidahnya); dan Mengekalkan negara beraja.

Tujuan pendidikan di Brunei Darussalam berdasarkan pada Falsafah Melayu Islam Beraja yakni perpaduan agama dan sains. Tujuan pendidikan Brunei Darussalam adalah terbentuknya manusia yang berakhlak dan beragama serta menguasai teknologi tinggi.

### 1) Berakhlak

Ahlak berasal dari bahasa Arab yakni خلق “*khulq*” yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabi'at.<sup>34</sup> pengertian ini berdasar pada Q.S. al-Qalam, ayat ke empat:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: “*dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung*”

Sedangkan secara istilah, menyitir pendapat Imam Al-Ghazali yang mendefinisikan akhlak dengan “*Haiat atau sifat yang tertanam didalam jiwa yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan*”. Berakhlak dalam tujuan pendidikan Islam merupakan sebuah korelasi misi kerasulan Rasulullah saw sebagaimana dalam Hadits:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: “*Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak mulia*”(H.R. Baihaqi).

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw adalah sosok tauladan umat Islam dan umat lainnya secara umum, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

<sup>34</sup>Mansur Ali Rajab, *Ta'ammulat fi Falsafah al-Akhlak*, (Mesir: Maktabah al-Anjalu al-Mishriyah, 1961), 13.

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*”

Dengan demikian berakhlak adalah berperilaku dengan akhlak islami, identitas seorang muslim tergambar dari perform tingkah lakunya yang baik, bukan hanya pada ketekunan dan rajin beribadah tapi tidak memberi pengaruh pada tingkah lakunya.

## 2) Beragama

Agama dalam bahasa Arab disebut *Din* yang memiliki pemaknaan banyak. Makna utama dalam kata *din* yaitu penyerahan diri.<sup>35</sup> Menurut istilah, dikutip dari pendapatnya Sidi Ghazalba, bahwa yang dimaksud dengan agama adalah hubungan manusia dengan yang maha kudus.<sup>36</sup> Beragama berarti menyerahkan diri dengan tunduk dan patuh pada zat yang maha suci yakni Allah Swt.

Penyerahan diri, tunduk dan patuh lahir dari sebuah keimanan akan adanya zat yang maha kuasa dan atas kesadaran bahwa dirinya tidak mempunyai kuasa/lemah, atas kesadaran tersebut maka timbulah keinginan hati untuk beribadah menyembah zat yang maha kuasa dengan penuh keikhlasan sebagai bentuk manifestasi dari sikap berserah diri, tunduk dan patuh. Sebagaimana di jelaskan dalam QS. Az-zumar ayat 11:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

Artinya: “*Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama*”.

Ibadah dalam Lisan al-Arab dinyatakan dengan konteks bahasa, yaitu:

العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع ومنه معبد اذا كان مذللاً بكثرة الوطء

Artinya: “*Ibadah secara bahasa adalah ketaatan serta merendahkan diri, dan mencakup cara penyembahan jika merendahkan dengan banyak melakukannya*”.

<sup>35</sup>Diana Sari, “Makna Agama Dalam Kehidupan Modern” dalam *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 1 (2019) pp. 16-23 pISSN: 1829-8931 | eISSN: 2550-0880.

<sup>36</sup>A.H. Hasanudin, *Cakrawala Kuliah Agama*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1980), h. 81.

Dalam pendapat Yusuf al-Qaradhawi bahwa ibadah pada tataran mulanya adalah taat, tunduk, patuh, merendahkan diri dan hina. Semua pengertian ini mempunyai makna yang berdekatan, jika seseorang yang tunduk, patuh, merendahkan diri dan menghinakannya dihadapan yang disembah disebut *abid* (Yang beribadah). Begitu juga seorang budak disebut *`abdun*, karena dia harus tunduk dan patuh serta merendahkan diri terhadap majikannya.<sup>37</sup>

Tujuan pendidikan ini ditentukan berdasarkan pada tujuan hidup. Sedangkan tujuan hidup itu dipengaruhi dari hakikat manusia, tujuan pendidikan adalah penjabaran dari tujuan hidup manusia. Sedangkan tujuan hidup manusia sebagai hamba tuhan adalah menyembah Allah Swt sebagaimana dalam Q.S. adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku"

### 3) Sains dan Teknologi

Sains berasal dari bahasa latin, yaitu *scio*, *scire*, dan *scientia* artinya adalah pengetahuan. Secara istilah sains adalah satu kumpulan ilmu yang tersusun dan teratur berkaitan dengan kajian fenomena dalam alam tabiat yang bernyawa dan tidak bernyawa dengan kaedah yang objektif melalui kajian eksperimen dan terapan untuk menghasilkan prinsip yang bisa dipercayai serta bisa diuji kebenarannya. Sedangkan teknologi dipandang sebagai pengaplikasian ilmu sains atau semua ilmu secara sistematis yang dapat membawa perubahan atau kemudahan. Teknologi juga boleh didefinisikan sebagai suatu aspek sains yang sifatnya memudahkan sesuatu dan sekiranya teknologi dilakukan dengan niat yang baik serta digunakan pada kebaikan maka kesejahteraan hidup manusia akan tercipta.<sup>38</sup>

Dalam Islam, pendidikan tidak hanya terbatas pada ilmu agama saja sebagaimana terjadi pendikotomian disiplin ilmu antara ilmu umum dan ilmu agama, karena sumber ilmu dalam al qur'an cakupannya sangatlah luas dan kesemuanya itu sangat bermanfaat bagi manusia, baik dalam masalah ukhrawi dan duniawi, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Qomar Ayat 17 :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

<sup>37</sup>M. Ridwan Hasbi, *Hadis-hadis Form Ibadah To Ahlak*, (Pekanbaru: Asa Riau, 2017), h. 3.

<sup>38</sup>Muhamad Izzat Ibrahim, dkk, *Islam serta Pembentukan Sains dan Teknologi in Prosiding Seminar Tamadun Islam*, (Universitas Teknologi Malaysia, 2018, Program anjuran Akademi Tamadun Islam), p. 1-12. ISBN: 978-967-2171-28-7. h. 2.

Artinya: “*Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?*”

Al-Qur'an didalamnya mencakup 6.236 ayat yang terdiri dari sekitar 850 ayat kauniyah/alam.<sup>39</sup> Ayat kauniyah adalah ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang persoalan hidup dan kehidupan menyangkut alam raya dan fenomenanya. Yang kesemuanya itu sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia.

Dengan demikian tujuan pendidikan secara umum di Brunei Darussalam telah sesuai dengan tujuan pendidikan secara normatif yaitu tujuan yang harus dicapai berdasarkan kaidah-kaidah yang mampu mengkristalisasikan nilai-nilai yang hendak diinternalisasikan, dan tujuan pendidikan secara fungsional yaitu ujian ini bersasaran pada kemampuan anak didik untuk memfungsikan daya kognitif, afektif, dan psikomotor dari hasil pendidikan yang diperoleh sesuai yang ditetapkan. dalam hal ini adalah Melayu Islam Beraja yaitu Islam sebagai *Guiding Principle*, dan Islam sebagai *Form of Fortification*

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurikulum pendidikan Islam di Brunei Darussalam dirumuskan pada sekolah berdasarkan pada falsafah Melayu Islam Beraja (MIB), yaitu penanaman nilai-nilai ke-Islaman dan kenegaraan dengan tiga konsep yaitu: Mengekalkan Negara Melayu, Mengekalkan Negara Islam, dan Mengekalkan negara beraja yang memadukan antara ilmu agama dan penguasaan teknologi.
2. Pendidikan di Negara Brunei Darussalam dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kesamaan pada kurikulum pelajaran Agama yang harus ada di setiap jenjang pendidikan, yang ditekankan agar pendidikan itu membentuk manusia yang berakhlak, bermoral dan berkepribadian luhur.
3. Perbedaan pada sistem penjenjangan, pendidikan di Brunei Darussalam dikenal dengan istilah A7-3-2-2 yakni pendidikan tingkat dasar ditempuh selama 7 tahun termasuk

---

<sup>39</sup>Masduha, *al-Alfaadz, Buku Pintar Memahami Kata-kata dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t.), h. 294.



didalamnya pendidikan TK pada anak yang berusia lima tahun. Kemudian jenjang pendidikan menengah ditempuh selama 3 tahun, jenjang pendidikan tingkat atas ditempuh selama 2 tahun, dan 2 tahun lagi tingkat pra-universitas. Sedangkan di Indonesia Pendidikan dasar ditempuh selama 9 Tahun yakni Tingkat Sekolah Dasar dan tingkat SLTP, sedangkan tingkat SLTA ditempuh selama 3 tahun pula tanpa ada jenjang pra-universitas. Anak usia 5 tahun diwajibkan untuk masuk sekolah TK di Brunei Darussalam, sedangkan di Indonesia tidak wajib.

4. Pada level pendidikan tingkat atas di Brunei Darussalam sudah menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar utamanya, sedangkan di Indonesia masih menggunakan bahasa indonesia.

Tujuan pendidikan di Brunei Darussalam secara umum mengacu pada tujuan pendidikan secara normatif dan fungsional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hasbi Abduh. "Perbandingan Pendidikan Di Negara Brunei Darussalam Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia:," *Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5.1 (2016).
- Abdullah, Mustaffa. *Khazanah Tafsir di Nusantara*. The University Of Malaysia Pers, 2011.
- Al-Sufri, Jamil, Mhd, Awwang, Haji. *Tarsilah Brunei: Sejarah Awal dan Perkembangan Islam*. Brunei Darussalam: Kementerian Kebudayaan, 2003.
- Arwildayanto, dkk. *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: Cendikia Press, 2018.
- Aslan, Suhari. *Sejarah Kurikulum Pendidikan Islam di Brunei Darussalam*, *Jurnal Iqra'*, kajian Ilmu Pendidikan, E-ISSN: 2548-7892 & P-ISSN: 2527-4449, Volume 4, Issue 1, June 2019.
- Asnawi, Nur, Muhammad. *Kebijakan Pendidikan Islam Pada Era Globalisasi, Pasar Bebas, dan Revolusi Industri 4.0*. *Scolae: Journal of Pedagogy*, Volume 1, Number 2, 2018: 101-109.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dunn, N, William. *Pengantar analisis kebijakan publik edisi kedua, Indonesian Edition*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

- Ghofur, Abd. *Islam Dan Politik Di Brunei Darussalam, Suatu Tinjauan Sosio-Historis*. Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2005.
- Hasan, Muh. Tholchah. *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jakarta: Galasa Nusantara, 1997.
- Hasanudin, A.H. *Cakrawala Kuliah Agama*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1980.
- Hasbi, Ridwan. *Hadis-hadis Form Ibadah To Ahlak*. Pekanbaru: Asa Riau, 2017.
- Helmiati, dkk. “Analisis Kebijakan Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional ( SPN)-21: Peluang Dan Tantangannya Bagi Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam”, *Geneologi PAI Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9.2 (2022).
- Hermawan, Heris. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Ibrahim, Izzat, dkk. *Islam serta Pembentukan Sains dan Teknologi in Prosiding Seminar Tamadun Islam*. Universitas Teknologi Malaysia, 2018, Program anjuran Akademi Tamadun Islam), p. 1-12. ISBN: 978-967-2171-28-7.
- Imron, Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Isnaini, dkk. ‘Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Berunei’, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5.1 (2023).
- haidir Fadil, dkk. ‘Analisis Kebijakan Pendidikan Negara-Negara Asean Dalam Mendukung Suistanable Developments Goal’, *Islamika:Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5.1 (2023).
- Langgung, Hasan. *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Bandung: Al-maarif, 1980.
- Marimba, D. Ahmad. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma’arif, 1991.
- Masduha. *al-Alfaadz, Buku Pintar Memahami Kata-kata dalam al-Qur’an* Jakarta: Pustaka al kausar, t.t..
- Mislaini. *Pendidikan Islam di Brunei Darussalam*. Al-Kahfi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume IV, No. 2, Juli Tahun 2019.
- Muhaimin. *Pemikiran dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muthohhar, dkk. *Pengaruh Mazhab Syafii di Asia Tenggara*. Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Nugroho, dkk. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Priatna, Tedi, Mahmud. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung, Sahifa, 2005.

Rajab, Ali, Mansur. *Ta'ammulat fi Falsafah al-Akhlak*. Mesir: Maktabah al-Anjalu al-Mishriyah, 1961.

Sari, Ana, Diana. *Makna Agama Dalam Kehidupan Modern*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 1 (2019) pp. 16-23 pISSN: 1829-8931 | eISSN: 2550-0880.

Syukri. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Brunei" dalam *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan Volume 20 Nomor 1 Tahun 2023*.

Yusran, Muhammad. 'Kurikulum Pendidikan Islam Di Thailand Dan Brunei Darussalam (Kajian Pada Jenjang Pendidikan Pesantren)', *Jurnal Al-Risalah*, 15.1 (2019).

Yahya, Masuriyati, Che Zarrina. Fakulti Usuluddin, Universiti Islam, Sultan Sharif, Jalan Pasar, and others, 'Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21 Brunei Darussalam Dalam Melestari Ketamadunan Islam Negara Zikir: Cabaran Dan Harapan', *Afkar*, 16.(Januari-Juni (2015).

Yulanda, Novidya. 'Perbandingan Kurikulum Social Studies Di Korea Selatan Dan Brunei Darussalam', *Research and Development Journal Of Education*, 5.2 (2019).